

Al-Tadzkiyyah

Jurnal Pendidikan Agama Islam

التذكية



mosaiccalligraphy.co

DITERBITKAN OLEH:

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Al-Tadzkiyyah

Jurnal Pendidikan Agama Islam

DEWAN REDAKSI

Pengarah

Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung
Prof. Dr. Hi. Syaiful Anwar, M. Pd

Penanggung Jawab

PD I Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung
Drs. Hi. Alinis Ilyas, M. Ag

Pemimpin Redaksi

Dra. Istihana, M.Pd

Redaktur Pelaksanaan

Saiful Bahri, M. Pd. I

Anggota Redaksi

A. Fatoni, M. Pd. I
Sauri, S.I.Kom
Sunarto, M. Pd. I

Tim Ahli

Dr. Syamsuri Ali, M. Ag
Dr. Deden Makbullah, M.Ag

Tata Usaha / Publikasi

Drs. Abdurrahman Simpi
Drs. Ahmad Syukri, MM

Alamat Redaksi

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Letkol H. EndroSuratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. 0721-7808887 / Fax. 0721-780442

Al-Tadzkiyyah

Jurnal Pendidikan Agama Islam
VOL. 6, Oktober 2013

DAFTAR ISI

Urgensi Pendidika Islam dalam Transformasi dan Proteksi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia.

M. AKMANSYAH 1__16

Konsep Manajemen Pendidikan Islam.

ISTIHANA 17__43

Trend Media Pembelajaran Microteaching di Perguruan Tinggi.

AGUS JATMIKO 44__63

Konsep Pendidikan Akal Perspektif Al-Qur'an.

JUHAETI YUSUF 64__76

Strategi Pembelajaran Bercerita Pada Pendidikan Anak Usia Dini.

OKI DERMAWAN 77__104

Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter.

A. FATONI 105__127

Implementasi Islam Multidisipliner dalam Kehidupan

SUNARTO 128__155

Teori Tentang Profesionalisme Dosen Bahasa Arab dalam Mengembangkan Pembelajaran Internatif.

YUYUN ROHMATUL UYUNI 156__174

URGENSI PENDIDIKAN AGAMA DALAM TRANSFORMASI DAN PROTEKSI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA

M.AKMANSYAH

Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung

Abstract

Religious education today is a complex task, which is made more difficult by rapid social, economic, and cultural changes. Its specific mission remains the integral formation of the human person. Children and young people must be guaranteed the possibility of developing harmoniously their own physical, moral, intellectual and spiritual gifts, and they must also be helped to develop their sense of responsibility, learn the correct use of freedom, and participate actively in social life. Religious education has always played a major role in education, both formal and informal. The Religious education has also shared acknowledgment of and commitment to the value and dignity of every human life. The religious education valuing of human life and dignity is a powerful foundation for modern legal instruments and processes for the promotion and protection of human rights. Coupling the educational role and capacities of religious education to human dignity, human rights education has gradually come to assume a more prominent place in the work of faith communities and related organizations.

Keyword: *Education Religious, human rights*

A. Pendahuluan

Pendidikan, sebagaimana Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan proses untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Guna mencapai tujuan tersebut, diperlukan kondisi belajar yang kondusif dan jauh dari kekerasan. Namun dewasa ini kita sering dikejutkan dengan berbagai macam kasus mengenai kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan (*school bullying*).

Budaya kekerasan yang marak belakangan ini dan sebagian melibatkan sentimen keagamaan, merupakan perluasan kekerasan sistematis atas anak-anak di ruang-ruang kelas. Mereka hampir tak memiliki ruang ekspresi diri. Kegagalan pendidikan secara umum dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, juga sering ditunjuk sebagai penyebab terjadinya kekerasan di masyarakat. Sekolah dituding sebatas hanya memperkenalkan nilai-nilai yang bersifat kognitif, itupun pada taraf menghafal. Tidak ada proses dan tidak ada internalisasi nilai pada diri siswa.

Masyarakat yang plural membutuhkan ikatan keadaban (*the bound of civility*), yakni pergaulan antara satu sama lain yang diikat dengan suatu keadaban (*civility*). Ikatan ini pada dasarnya dapat dibangun dari nilai-nilai universal ajaran agama. Karena itu, bagaimana guru agama mampu membelajarkan pendidikan agama yang difungsikan sebagai panduan moral dalam kehidupan masyarakat yang serba plural tersebut, dan bagaimana guru agama mampu mengangkat dimensi-dimensi konseptual dan substansial dari ajaran agama, seperti kejujuran, keadilan, kebersamaan, kesadaran akan hak dan kewajiban, ketulusan dalam beramal, musyawarah dan sebagainya, untuk diaktualisasikan dan direalisasikan dalam hidup dan kehidupan masyarakat yang plural tersebut. Manusia Indonesia haruslah manusia toleran, inklusif dan demokratis terhadap berbagai pengelompokan masyarakat berdasarkan paham, suku, bahasa maupun agama. Untuk itu, pendidikan pluralitas, HAM dan demokrasi menjadi sangat penting.

B. Pembahasan

1. Fungsi Strategis Pendidikan

Pendidikan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Pendidikan merupakan salah satu agen perubahan sosial; di satu sisi ia dipandang sebagai suatu variabel modernisasi atau pembangunan. Tanpa pendidikan yang memadai, akan sulit bagi masyarakat manapun untuk mencapai kemajuan.¹ Namun di sisi lain, pendidikan merupakan *human investment*,² secara historis maupun filosofis, ia telah ikut mewarnai dan menjadi landasan moral dan etik dalam proses pembentukan jati diri bangsa.³

Menurut Cordero, dkk., fungsi pendidikan bagi masyarakat adalah sebagai berikut: *Pertama*, menjaga kebudayaan suatu masyarakat dan memindahkannya kepada generasi berikutnya. Sekolah-khususnya universitas-adalah gedung ilmu pengetahuan. Lembaga pendidikan merefleksikan nilai-nilai dominan suatu masyarakat; *Kedua*, sekolah adalah agen sosialisasi yang utama. Setelah keluarga dan kelompok permainan, sekolah adalah melanjutkan proses sosialisasi. Di sekolah ditanamkan nilai, norma serta harapan-harapan dari masyarakat terhadap seseorang. Di sekolah seseorang memperoleh kebiasaan, apresiasi, serta pandangan terhadap hidup. Di sekolah siswa belajar kontrol diri; *Ketiga*, secara singkat, sekolah adalah tempat di mana orang mempelajari "prinsip-prinsip" yang akan mendasari perilakunya sebagai warga masyarakat.⁴

¹Azyumardi Azra, *Pembaruan Pendidikan Islam*, dalam Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Amisco, 1996) h. 2-3

²A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Fajar Dunia, 1999), h. 157

³Salah satu bukti otentiknya sebagaimana dinyatakan dalam Tujuan Pendidikan Nasional pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menyebutkan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

⁴Cordero, dkk., sebagaimana yang dikutip oleh P. Paul Nganggung, SVD., dalam Th. Sumartana, dkk, *Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 260. Selanjutnya sekolah juga berfungsi untuk menumbuhkan kemampuan memberi penilaian yang cermat, meningkatkan kesadaran akan tata nilai. Memupuk persahabatan antara para siswa yang beraneka watak-perangai, mengembangkan sikap saling memahami, selain itu menciptakan sekolah sebagai lingkungan hidup bersama; sekolah mengajarkan keterbukaan dan dialog antara siswanya.

Oleh sebab itu, pendidikan menjadi variabel yang tidak dapat diabaikan dalam transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *konservatif* dan *progresif*.⁵ Fungsi konservatif pendidikan adalah bagaimana mewariskan dan mempertahankan identitas dan cita-cita suatu masyarakat. Sedangkan fungsi progresifnya adalah bagaimana aktivitas pendidikan dapat memberi perbekalan dan pengembangan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan sehingga generasi penerus memiliki kemampuan dan kesiapan dalam menghadapi tantangan kehidupan masa depan.

Menurut Mansour Fakih, hal-hal tersebut di muka adalah menjadi faktor-faktor penyebab mengapa kebudayaan dan keyakinan ummat manusia terus menerus berusaha untuk menjaga dan mempertahankan penyelenggaraan pendidikan secara turun menurun. Penyelenggaraan pendidikan selanjutnya menjadi kewajiban kemanusiaan atau sebagai strategi budaya dalam rangka mempertahankan kehidupan mereka. Begitu pentingnya arti pendidikan bagi ummat manusia, menyebabkan banyak peradaban manusia yang “mewajibkan” masyarakatnya untuk tetap menjaga keberlangsungan pendidikan.⁶ Banyak tradisi dan keyakinan manusia menekankan akan pentingnya pendidikan dan mewajibkan penganutnya untuk menuntut ilmu. Semua itu semata-mata didasarkan pada keyakinan bahwa eksistensi ummat manusia akan terancam jika pendidikan diabaikan.

⁵Karnadi Hasan, *Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam*, dalam Ismail SM, Nurul Huda, Abdul Kholiq (ed) *Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) h. 234

⁶Mansour Fakih, *Komodifikasi Pendidikan sebagai Ancaman Kemanusiaan*, (Pengantar) dalam Fancis X. Wahono, *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. iv

2. Pendidikan, Hak Dasar Manusia

Pendidikan, pada akhirnya, secara tegas ditetapkan sebagai salah satu hak asasi manusia, salah satu hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, baik sebagai warga suatu negara maupun warga dunia. Pemerintah wajib memenuhinya apapun kondisi sosial, ekonomi dan politik negara tersebut. Tidak ada alasan bagi setiap warga untuk tidak mendapatkan hak-hak dasar tersebut. Pemikiran ini berlandaskan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) 1948 dimana pada pasal 26 ayat 1 dinyatakan dengan tegas, "Setiap orang harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Pendidikan teknik dan profesi harus tersedia secara umum dan pendidikan yang lebih tinggi harus sama-sama dapat dimasuki semua orang berdasarkan kemampuan."⁷

Deklarasi Universal tentang HAM tepatnya pasal 26 merupakan komitmen umat manusia untuk menetapkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar. Artinya, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berkewajiban untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak mereka tanpa memandang suku, warna kulit, keyakinan agama maupun jenis kelamin dan kelas sosial ekonominya. Konvensi PBB tentang hak-hak anak bahkan menetapkan bahwa negara peserta konvensi berkewajiban memberikan pendidikan secara gratis bagi anak hingga usia 18 tahun. Tugas negara dalam urusan HAM adalah melindungi, mempromosikan dan mencegah pelanggaran terhadap hak asasi warga negaranya. Dengan demikian, wajib belajar dalam konteks hak asasi manusia adalah kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan bagi warga negaranya.

Sejak saat itulah menurut Fakih, peradaban manusia telah melahirkan suatu paham bahwa "pendidikan" pada dasarnya adalah hak asasi manusia. Perjalanan peradaban umat manusia akhirnya mencapai puncaknya, di mana manusia meneguhkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melanggengkan eksistensi umat manusia dari kepunahan. Itulah sebabnya mengapa setiap kegiatan politik, ekonomi maupun sosial yang

⁷Ian Brownlie, *Basic Documents on Human Raights*, alih bahasa Beriansyah, *Dokumen-dokumen Pokok mengenai Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: UI Press, 1993), edisi II, h. 33; lihat pula Hadi Setia Tunggal, *Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Harvarindo, 2000), h. 8

bertujuan untuk menghalangi, ataupun yang akan menyebabkan anggota masyarakat tidak mendapatkan pendidikan, dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.⁸

Menurut Darmaningtyas, selain merupakan hak yang harus dimiliki oleh semua warga, pendidikan harus memikul tanggungjawab yang berat untuk turut serta mewujudkan pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak hidup, kebebasan mengeluarkan pendapat, berpikir, berserikat, berkarya, memperoleh akses informasi secara benar, dan lain sebagainya.⁹ Jadi, dalam hak memperoleh pendidikan terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan. Tetapi kewajiban itu sendiri hanya mungkin terlaksana bila pendidikan berlangsung secara benar, bukan sebaliknya, pendidikan itu sendiri yang harus diarahkan agar berfungsi dalam pengembangan hak asasi manusia secara utuh.

3. Pengembangan Nilai-Nilai HAM

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 26 ayat 2 mengamanatkan, "Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace."¹⁰ (Pendidikan harus diarahkan bagi pengembangan sepenuhnya keperibadian manusia dan bagi penguatan penghargaan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan yang mendasar. Ia harus mengembangkan pengertian, toleransi, serta persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras atau agama dan harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pemeliharaan perdamaian).¹¹ Sedangkan ayat 3 menyatakan, "Para orangtua memiliki hak istimewa untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka"¹²

⁸Fakih, *Op. Cit.* h. viii-xi

⁹Darmaningtyas & I. Sumardianta, *Ironi dan anomali HAM di Dunia Pendidikan*, dalam Wacana Edisi 8, Tahun II 2001, h. 211

¹⁰Tunggal, *Universal*, *op. cit.*, h.17

¹¹Hadi, *Loc. Cit.*

¹²*Ibid*

Untuk itu menurut T. Mulya Lubis dkk., hak asasi harus menjadi tema sentral dalam kesempatan dan proses pendidikan, karena tujuan pendidikan diarahkan kepada manusia. Pendidikan membebaskan manusia dari kondisi yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan harus memunculkan kehidupan yang lahir dari dalam, dalam membentuk manusia yang mandiri. Tujuannya adalah merealisasikan potensi pada anak untuk menjadi manusia dan warga negara yang efektif dalam pekerjaan, bertanggungjawab dan demokratis.¹³ Sekolah menjadi tempat khusus untuk tumbuh dan berkembang. Anak didik diberi kesempatan untuk berkembang, mengembangkan minat dan kemampuannya. Perkembangan memerlukan penghayatan kebebasan sebagai asas demokrasi. Sebagai bagiannya adalah kebebasan berfikir dan berpendapat.

Didin Syafrudin menegaskan bahwa lembaga pendidikan harus merespon persoalan hak asasi manusia. Sudah menjadi fakta bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dari segi suku, agama dan paham politik. Yang memprihatinkan adalah pengakuan pluralitas itu kian merosot dan terbukti mudah sekali menjadi api perpecahan sesama warga negara Indonesia.¹⁴

Untuk menjamin pertumbuhan setiap orang dan kelompok ke tingkat optimal, tidak ada cara lain kecuali menanamkan nilai-nilai kebebasan. Asas-asas kebebasan harus menjadi asas utama pengelolaan masyarakat yang pluralistik. Dengan adanya kebebasan, berarti setiap orang memiliki hak mengekspresikan keyakinan, pemikiran dan ideologinya. Namun pada saat yang sama, ia juga harus menghargai kebebasan orang lain.

¹³T. Mulya Lubis, Fauzi Abdullah, Mulyana W. Kusumah, *Laporan Keadaan Hak asasi Manusia di Indonesia 1981*, (Jakarta: PT Djaya Pirusa, 1983), h. 75.

¹⁴Didin Syafrudin, *Meninjau Keberadaan Fakultas Tarbiyah*, dalam Komaruddin Hidayat & Hendro Praetoyo (ed), *Problem dan Prospek IAIN, Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, (Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam: Departemen Agama RI, 2000), h. 143.

4. Persoalan HAM dalam Pendidikan

Nilai-nilai pluralitas, HAM dan demokrasi harus mendapat tempat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Manusia Indonesia mendatang haruslah manusia toleran, inklusif dan demokratis terhadap berbagai pengelompokan masyarakat berdasarkan paham, suku, bahasa maupun agama. Sebab globalisasi secara paradoks berkembang disertai gejala fortifikasi atau lahir dan berkembangnya warna-warna lokal. Untuk menghadapi itu, pendidikan pluralitas, HAM dan demokrasi menjadi penting.¹⁵

Persoalan yang kita hadapi saat ini menurut Darmaningtyas, adalah pendidikan sudah lama dirasakan tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya pribadi-pribadi manusia yang memiliki nilai-nilai dasar, seperti keteguhan dalam berprinsip, berkonsistensi, integritas, disiplin, bertanggungjawab, berkerelaan.¹⁶ Kecemasan akan masa depan pendidikan sudah berkali-kali dinyatakan oleh para pemikir (pendidikan)—seperti Ivan Illich, dalam bukunya, *Deschooling Society*,¹⁷ Everett Reimer, *School is Dead*,¹⁸ Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*,¹⁹ dan Neil Postmandalam *End of Education*.²⁰ Sinisme, satir, dan kredo yang menohok kenyataan praktik-praktik pendidikan muncul tanpa henti. Namun, pendidikan tetap saja menawarkan sesuatu yang sifatnya material dan

¹⁵*Ibid*.

¹⁶Darmaningtyas...*Op. Cit.*, h. 211

¹⁷Ivan Illich, *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah* (*Deschooling Society*) Sonny Kerap (penerjemah), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000).

¹⁸Everett Reimer, *Matinya Sekolah* (*School is Dead*), M. Soedomo (penerjemah), (Yogyakarta: Hanindita Graha Widia, 2000)

¹⁹Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas* (*Pedagogy of the Oppressed*), Tim Redaksi (penerjemah), (Jakarta: LP3ES, 2000)

²⁰Neil Postman, *The End of Education: Redefining the Value of School* (*Matinya Pendidikan: Redefinisi nilai-nilai Sekolah*), pent. Siti Farida, (Yogyakarta, Jendela Ilmu, 2001)

positivistik segala sesuatu diukur berdasarkan skala-skala kuantitatif, misalnya angka partisipasi masyarakat yang tinggi, nilai ujian yang tinggi, serta jumlah lulusan. Sedikit sekali yang melihat aspek nilai-nilai yang dimilikinya, seperti keadilan, kejujuran, solidaritas, empati terhadap penderitaan sesama, dan toleransi yang tinggi terhadap segala bentuk perbedaan. Simplifikasi persoalan pendidikan ke dalam aspek-aspek yang bersifat ekonomis-material-teknis.²¹

Selain itu, substansi pendidikan belum mampu menumbuhkan sikap kritis, termasuk terhadap kebijakan pendidikan itu sendiri, karena pendidikan telah direduksi menjadi instrumen bagi kepentingan politik penguasa. Oleh sebab itu, isi pendidikan memang tidak dirancang untuk menumbuhkan daya kritis, menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, solidaritas, toleransi, disiplin, tanggungjawab, dan konsistensi. Tapi semua diletakkan dalam kerangka mempertahankan ideologi penguasa.

Munculnya kebudayaan bisu (*Silence Culture*) adalah sebagai ekspresi dari ketidakberdayaan dan ketakutan dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan. Karena nilai-nilai yang tercantum dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi lebih merupakan kewajiban asasi yang tidak dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab. Budaya bisu tidak saja berkembang di kalangan masyarakat awam, tetapi juga telah menjadi situasi khas ruang-ruang belajar dalam sistem persekolahan kita. Kondisi ini telah diciptakan sedemikian rupa pada era pemerintahan Orde Baru. Dalam kurun waktu yang panjang, para penguasa telah mematikan inisiatif, kreativitas dan bahkan sikap inovatif individu dan kelompok sebagai gambaran dari kepatuhan atas nama stabilitas nasional dari segala bidang demi lajunya pembangunan.²²

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*, h. ix

Mulkhan menyimpulkan bahwa budaya kekerasan yang marak belakangan ini dan sebagian melibatkan sentimen keagamaan, merupakan perluasan kekerasan sistematis atas anak-anak di ruang-ruang kelas. Di ruang kelas, anak-anak hampir tak memiliki ruang ekspresi diri. Sosok anak-anak itu hanya berharga jika sesuai dengan citra guru, pengelola pendidikan, elite agama dan pemerintah yang menganggap diri moralis.²³

Keunikan pribadi dan keagamaan menjadi barang asing di ruang kelas. Anak-anak hanyalah tiruan pribadi kelas, sekolah, masyarakat, bangsa dan agama. Keseragaman adalah kebaikan dan kebenaran. Namun, anak-anak harus bersaing atas dirinya dan orang lain agar berharga bagi orang tua, masyarakat bangsa dan agamanya menurut versi elite. Pendidikan, negara, bangsa dan agama, tanpa disadari, tumbuh sebagai musuh paling menakutkan yang tidak mungkin dihindari anak-anak. Dari sinilah kerinduan atas jati diri dicari-cari dari pembrontakan di luar ruang kelas.

Saat ini menurut Suparno, gambaran orang bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah, berbudaya dan berbudi pekerti luhur telah mulai pudar. Kekerasan dan tindakan tidak manusiawi terjadi di mana-mana dan berlangsung lama. Tudingan yang tidak dapat dihindari pada kegagalan pendidikan di sekolah pada umumnya dan secara khusus pendidikan nilai atau pendidikan budi pekerti.²⁴

Wajar kiranya apabila kegagalan pendidikan di sekolah dalam mencerdaskan masyarakat juga diduga menjadi penyebab timbulnya kekerasan dan kebiadaban di masyarakat. Kegagalan pendidikan akan menghasilkan orang yang tidak berkembang daya nalarnya, terbatas pengetahuan dan wawasannya,

²³Abdul Munir Mulkhan, *Humanisasi Pendidikan Islam*, dalam Tashwirul Afkar Edisi No. 11 tahun 2001, h. 20

²⁴Paul Suparno, S.J dkk, *Reformasi Pendidikan: Sebuah Rekomendasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002) h. 74-75

serta sulit dewasa imannya. Selain kegagalan pendidikan secara umum dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang juga banyak ditunjuk sebagai penyebab terjadinya kekerasan di masyarakat adalah kegagalan pendidikan nilai khususnya, karena tiadanya pelajaran budi pekerti di sekolah. Sekolah dituding sebatas hanya memperkenalkan nilai-nilai yang bersifat kognitif, itupun pada taraf menghafal. Tidak ada proses dan tidak ada internalisasi nilai pada diri siswa.²⁵

Menurut Suparno, sampai sejauh ini kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai luhur diyakini oleh banyak orang menjadi motor penggerak perkembangan anak didik menjadi lebih manusiawi, berbudaya bermoral dan berbudi luhur. Kegagalan pendidikan nilai mengakibatkan orang menjadi barbar, amoral atau tidak beradab. Oleh sebab itu, hendaknya pendidikan nilai diberi perhatian dengan sebaik-baiknya.

5. Substansi Pendidikan Agama dan Nilai-Nilai HAM

Malik Fadjar berpendapat bahwa saat ini ada keinginan untuk menampilkan kembali nilai-nilai agama—melalui pendidikan agama—baik dalam bentuknya sebagai bagian dari sistem nilai maupun dalam sifatnya yang paradigmatis dalam kehidupan manusia. Dalam Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan agama mempunyai posisi formal yang kuat. Sebab, pendidikan agama diwajibkan untuk diajarkan, mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai ke jenjang pendidikan tertinggi. Menurutnya, meskipun dalam hal ini yang terpenting bukan pada kedudukan formalnya, tetapi pada substansi atau muatan keagamaan yang ditransformasikan dalam bentuk aktivitas pendidikan.²⁶

²⁵Paul, *Loc. Cit.*

²⁶A. Malik Fadjar, *Op. Cit.*, h. 131

Pendidikan agama mempunyai tempat sangat penting dan strategis dalam sistem pendidikan nasional, secara keseluruhannya karena pendidikan agama di antaranya berujung pada pendidikan “*akhlak*”. Peran strategisnya dalam sistem tersebut di antaranya dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²⁷ Soedjatmoko mengungkapkan tugas khusus pendidikan agama dalam usaha pembangunan bangsa. Ia mengakui bahwa sudah barang tentu tugas semua pendidikan adalah membina manusia susila, manusia yang berakhlak mulia. Tetapi pendidikan agama dalam suatu perubahan sosial mempunyai tugas khusus, dalam arti pembinaan anak didik untuk berketakutan yang benar dalam suatu situasi yang tidak menentu patokan-patokan moralnya.²⁸

Dalam memenuhi fungsinya untuk membina kepribadian yang kuat dan akhlak yang luhur anak didik, pendidikan agama harus mampu menghubungkan nilai-nilai normatif yang abstrak yang diterima anak didik dengan kenyataan-kenyataan sosial yang ada. Dengan demikian, para anak didik akan terdorong untuk bersikap kritis dan kreatif dalam menghadapi kenyataan-kenyataan sosial tadi. Jika pendidikan agama dapat memenuhi fungsi ini, maka pendidikan agama dapat memberikan suatu sumbangan pada penumbuhan dan pemupukan sikap toleransi antaragama dan peningkatan kerjasama antaragama dalam menghadapi masalah-masalah sosial di Indonesia.

Pendidikan agama akan dapat memenuhi fungsinya, apabila ia mampu menggerakkan para anak didik untuk belajar mengamalkan ajaran-ajaran agama yang mereka terima dalam kehidupan sehari-hari mereka. “Pendidikan

²⁷Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²⁸Soedjatmoko, *Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang Agama, Kebudayaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LP3S, 1984), h. 272

agama yang hanya menekankan hafalan kaidah-kaidah keagamaan dalam bentuk yang abstrak-steril kurang mempunyai relevansi dengan usaha mengelola perubahan sosial melalui berbagai usaha pembangunan dan untuk membina anak didik menghadapi masa peralihan ini secara positif, sebagai manusia susila.”²⁹

Substansi pendidikan agama yang mengajarkan nilai-nilai dasar kemanusiaan, menanamkan daya kritis, menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, solidaritas, toleransi, disiplin, tanggungjawab dan konsistensi,³⁰ sehingga dalam hal ini transformasi nilai-nilai pluralitas, HAM dan demokrasi dapat dimungkinkan melalui pembelajaran Pendidikan Agama.

Pendidikan agama dapat berperan aktif dalam upaya sosialisasi dan internalisasi berbagai nilai-nilai yang saat ini dirasakan sangat perlu ditekankan, antara lain (untuk menyebutkan beberapa yang dasar) keimanan dan kasih sayang, keadilan dan kepekaan pada golongan lemah dan kurang mampu, tanggung jawab pada kepentingan umum, hormat kepada sesama, kejujuran dan kelugasan, solidaritas dan keterlibatan sosial, kesatuan, kekeluargaan, kreativitas, rasionalitas, ketekunan, ketertiban dan lain-lain.

Pendidikan agama dapat pula memberikan sumbangan pada pembangunan pengertian, solidaritas, dan toleransi antar manusia. Mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, keterampilan yang membawa pada rasa hormat terhadap HAM dan upaya-upaya untuk mempertahankan hak-hak tersebut. Pemahaman dan pengetahuan tentang HAM bukanlah kodrat yang menempel pada tiap pribadi. Diperlukan sebuah proses

²⁹*Ibid.*, h. 274

³⁰Kritik terhadap pendidikan agama itu seperti terlalu bersifat kognitif dan dogmatis; pendidikan agama tidak berhasil meletakkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, solidaritas, dan toleransi; korupsi dan berbagai bentuk penyalahgunaan lain tetap tinggi, solidaritas sosial rendah dan tidak ada toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Lihat Darmaningtyas, *Op. Cit.*, h. 212

realisasi untuk menghidupkan HAM dalam kesadaran atau bahkan dalam alam bawah sadar kita.

Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagaimana pendidikan agama umumnya, merupakan bagian integral dari sistem nilai, di mana nilai-nilai HAM menjadi bagian dari nilai-nilai yang disosialisasikan melalui isi kurikulumnya. Proses pemahaman serta penghayatan nilai-nilai tersebut melalui kurikulum PAI tentu akan lebih mudah dan lebih cepat. Karena PAI bertujuan untuk mewujudkan manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lagipula PAI mempunyai posisi formal yang kuat dalam Sistem Pendidikan Nasional dan diwajibkan untuk diajarkan di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan.³¹

C. Kesimpulan

Mengingat HAM sudah merupakan isu global dan penegakannya telah menjadi komitmen internasional, maka pemerintah berkewajiban menyediakan ruang yang cukup untuk pendidikan bagi anak-anak mereka tanpa memandang suku, warna kulit, keyakinan agama maupun jenis kelamin dan kelas sosial ekonominya. Meski demikian, pendidikan masih menawarkan sesuatu yang sifatnya material dan positivistik segala sesuatu diukur berdasarkan skala-skala kuantitatif. Sedikit sekali yang melihat aspek nilai-nilai yang dimilikinya, seperti keadilan, kejujuran, solidaritas, empati terhadap penderitaan sesama, dan toleransi yang tinggi terhadap segala bentuk perbedaan. Simplifikasi persoalan pendidikan ke dalam aspek-aspek yang bersifat ekonomis-material-teknis. Oleh sebab itu, Pendidikan Agama khususnya Pendidikan Islam yang bersubstansikan nilai-nilai dasar kemanusiaan, menanamkan daya kritis, menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, solidaritas, toleransi, disiplin, tanggungjawab dan konsistensi, sehingga dalam hal ini transformasi dan

³¹ Lihat UUSPN 1998 pasal 39 ayat 2, *op. cit.*, h. 16

proteksi nilai-nilai pluralitas, HAM dan demokrasi dapat dimungkinkan melalui pembelajarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra, *Pembaruan Pendidikan Islam*, dalam Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Amissco, 1996
- A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia, 1999
- Abdul Munir Mulkhan, *Humanisasi Pendidikan Islam*, dalam Tashwirul Afkar Edisi No. 11 tahun 2001
- Cordero, dkk., sebagaimana yang dikutip oleh P. Paul Nganggung, SVD., dalam Th. Sumartana, dkk, *Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Darmaningtyas & J. Sumardianta, *Ironi dan anomali HAM di Dunia Pendidikan*, dalam Wacana Edisi 8. Tahun II 2001.
- Didin Syafrudin, *Meninjau Keberadaan Fakultas Tarbiyah*, dalam Komaruddin Hidayat & Hendro Prasetyo (ed), *Problem dan Prospek IAIN, Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam: Departemen Agama RI, 2000:143.
- Everett Reimer, *Matinya Sekolah* (School is Dead), M. Soedomo (penerjemah), Yogyakarta: Hanindita Graha Widia, 2000
- Fancis X. Wahono, *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 200

- Hadi Setia Tunggal, *Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Harvarindo, 2000
- Ian Brownlie, *Basic Documents on Human Raights*, alih bahasa Beriansyah, *Dokumen-dokumen Pokok mengenai Hak Asasi Manusia*, Jakarta: UI Press, 1993
- Ivan Illich, *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah* (Deschooling Society) Sonny Kerap (penerjemah), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Neil Postman, *The End of Education: Redifining the Value of School* (Matinya Pendidikan: Redifinisi nilai-nilai Sekolah), pent. Siti Farida, Yogyakarta, Jendela Ilmu, 2001
- Paul Suparno, SJ dkk, *Reformasi Pendidikan: Sebuah Rekomendasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2002
- Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas* (Pedagogy of the Oppressed), Tim Redaksi (penerjemah), Jakarta: LP3ES, 2000
- SM, Nurul Huda, Abdul Kholiq (ed) *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Soedjatmoko, *Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang Agama, Kebudayaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LP3S, 1984
- T. Mulya Lubis, Fauzi Abdullah, Mulyana W. Kusumah, *Laporan Keadaan Hak asasi Manusia di Indonesia 1981*, Jakarta: PT Djaya Pirusa, 1983
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul karya ilmiah (artikel) : Urgensi Pendidikan Islam Dalam Transformasi Dan Proteksi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia.
 Jumlah Penulis : 1 Orang
 Status Pengusul : Penulis Pertama
 Dr. Muhammadiyah Akmansyah, M.A.
 a. Nama Jurnal : Al-Tadzkiyyah
 b. Nomor ISSN : 1274763286
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : 6; Oktober 2013
 d. Penerbit : Prodi PAI FTK UIN RI Lampung
 e. DOI artikel (jika ada) : -
 f. Terindeks di : -
 g. Halaman : 1-16 (16 halaman)

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional/Internasional Bereputasi
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) ☐ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
☒ Jurnal Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah 10			Nilai Akhir yang diperoleh
	Internasional/ Internasional Bereputasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)			8	0,8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			27	2,7
c. Kecukupan dan kemutakhiran data / informasi dan Metodologi (30%)			27	2,7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)			27	2,7
Total = (100 %)			89	
Nilai Pengusul				8,9

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer:

Artikel ini menganalisis ttg bagaimana peran pendidikan dalam transformasi dan proteksi nilai-nilai. Artikel ini penting bagi para guru dg penguatan kurikulum serta integrasikan PAI dan nilai-nilai PAI. Selain itu, peran PAI lebih optimal dalam membangun karakter siswa.

Bandar Lampung, 21 April 2017
 Reviewer 1,



Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A.
 NIP. 195606111988031001
 Unit Kerja: UIN Raden Intan Lampung

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul karya ilmiah (artikel) : Urgensi Pendidikan Islam Dalam Transformasi Dan Proteksi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia.
 Jumlah Penulis : 1 Orang
 Status Pengusul : Penulis Pertama
 Dr. Muhammad Akmansyah, M.A.
 a. Nama Jurnal : Al-Tadzkiyyah
 b. Nomor ISSN : 1274763298
 c. Volume, nomor, bulan, tahun : 6, Oktober 2013
 d. Penerbit : Prodi PAI FTK UIN RI Lampung
 e. DOI artikel (jika ada) : -
 f. Terindeks di : -
 g. Halaman : 1-16 (16 halaman)

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal ilmiah Internasional/Internasional Bereputasi
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) ☐ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
☒ Jurnal Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir yang diperoleh
	Internasional/Internasional Bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)			8	0,8
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			27	2,7
c. Kecukupan dan kemutakhiran data / informasi dan Metodologi (30%)			28	2,8
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)			27	2,7
Total = (100 %)			90	
Nilai Pengusul				9

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer:

Artikel ini berupaya memberikan deskripsi ttg bagaimana pelaksanaan pendidikan Islam di sekolah dpt menjadi media transformasi. Dan fokus nilai 2 HAM, shg artikel ini penting utk di ketahui.

Bandar Lampung, 21 April 2017

Reviewer 2.

Dr. Hj. Siti Panniah, M.Pd.

NIP. 197211211998032007

Unit Kerja: UIN Raden Intan Lampung